

**KAJIAN IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM PERS
(STUDI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999)**



Oleh:

Okta Ahmad Faisal

NIM. E015309

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN

KAJIAN IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM PERS (STUDI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999)

Disusun Oleh :

Okta Ahmad Faisal

E0015309

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 September 2019

Pembimbing.



SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H.,M.H.

NIP. 196107211988032001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM PERS
(STUDI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999)

Disusun Oleh :
Okta Ahmad Faisal
NIM. E0015309

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

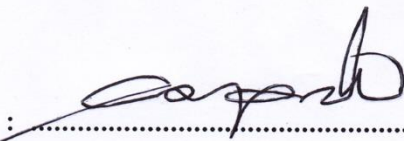
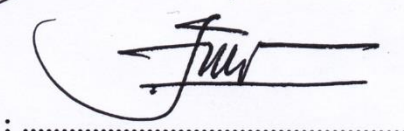
Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 1 Oktober 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Bambang Santoso, SH., M.Hum.**
NIP. 196202091989031001
Ketua

: 

2. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.**
NIP. 195706291985031002
Sekretaris

: 


3. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**
NIP. 196107211988032001
Anggota

:

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Okta Ahmad Faisal

N I M : E0015309

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul “Kajian Idealitas Penegakan Hukum Pers (Studi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999)” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Penulisan Hukum (Skripsi) tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan Gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) tersebut.

Surakarta, 16 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Okta Ahmad Faisal
E0015309

ABSTRAK

Okta Ahmad Faisal. 2019. E0015309. KAJIAN IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM PERS (STUDI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji permasalahan, *pertama* bagaimana idealitas penegakan hukum pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *Kedua*, mengapa penegakan hukum pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum khusus.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library reasearch*), selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas penegakan hukum pers didapat dari analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13 tahun 2008), dan juga pendapat ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan berjenjang, yaitu dengan melalui pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); kemudian PPR tersebut dapat menjadi dasar untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata). Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis. Dari sisi filosofis didapat alasan seperti negara demokratis harus memberi kepercayaan di bidang informasi kepada masyarakat; kebebasan pers merupakan Hak Warga Negara; pers berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran; pers dikontrol oleh masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi. Sedangkan dari sisi historis-politis dapat disimpulkan dengan perspektif Philips Nonet dan Philip Selznick, bahwa konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, akan melahirkan produk hukum responsif.

Kata Kunci : Undang-Undang Pers, politik hukum, penegakan hukum pers.

ABSTRACT

Okta Ahmad Faisal. 2019. E0015309. STUDY ABOUT IDEALITY OF PRESS LAW ENFORCEMENT (STUDY POLITIC OF LAW NUMBER 40 OF 1999). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This study describes and examines the problem, first how is the ideality of press law enforcement in terms of Law Number 40 of 1999. Second, why press law enforcement based on Press Law Number 40 of 1999 demands special legal politics. This research is an experimental normative law research. Legal Material types contain primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study (library research), then the technical analysis used is the deductive syllogism method.

The results showed that the ideality of press law enforcement was obtained from the analysis of the Pers Law, Supporting Regulations for the Press Law (Memorandum of Understanding between The Press Council-Police of Republic Indonesia, The Press Council-Attorney General's, and Circular of the Supreme Court Number 13 of 2008), and also legal and press expert research. The process of press law enforcement is carried out in stages, namely through the fulfillment of the Right to Answer and / or Correction Rights; then complaints to the Press Council; then the Press Council issues a Statement, Assessment, and Recommendation (PPR); then PPR can be the basis for the case brought to the litigative channel (both criminal and civil court). Law enforcement based on Law Number 40 of 1999 concerning different Politics of Law from philosophical and historical-political reasons. From a philosophical point of view, it was obtained that a democratic state must give trust in the field of information to the people; freedom of the press is a citizen's right; press plays roles encouragement to consider, criticize, correct, and give advice; and controlled by the people through the Right of Answer and Right of Correction. While from the historical-political side it can be concluded with the perspective of Philips Nonet and Philip Selznick, that authoritarian politic configuration will produce a repressive legal product. Otherwise, democratic politic configuration, will make legal products responsive.

Keywords: *Press Law, Politics of Law, press law enforcement.*

MOTTO

“Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya.”

Muhammad S.A.W.

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

Ali bin Abi Thalib

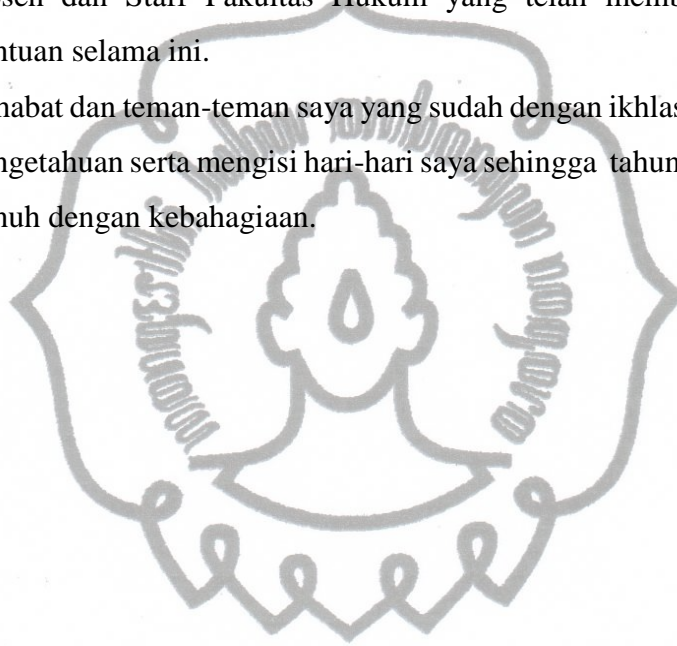
“Kita tulis itu karena kita murka. Murka tiada terhingga, marah besar, karena bangsa kita, si seperempat manusia diperlakukan seenaknya oleh pemerintah yang semestinya menjaga keselamatan si seperempat manusia yang lemah dan tidak berdaya itu!”

Tirto Adhi Soerjo

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karya ini penulis persembahkan kepada :

- ✓ Kedua orangtua dan kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moral dan finansial.
- ✓ Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini.
- ✓ Sahabat dan teman-teman saya yang sudah dengan ikhlas berbagi ilmu dan pengetahuan serta mengisi hari-hari saya sehingga tahun selama dikampus penuh dengan kebahagiaan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Kajian Idealitas Penegakan Hukum Pers (Studi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999) sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2. Bapak Harjono S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara
3. Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi memberi persetujuan dan bimbingan akademik selama masa perkuliahan.
6. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Agus Pribadi dan Ibunda Zat Budiani, serta kedua kakak saya, Mas Riki Akbar dan Mas Jelang Hardika, atas doa, motivasi, dan dukungan yang tak terbatas.
7. Sahabat Nuansa Malang selaku teman yang menghibur di kala jenuh mengerjakan skripsi.
8. Kakak, teman, dan adik di Lembaga Pers Mahasiswa NOVUM FH UNS yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran.

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf atas semua kesalahan baik disengaja maupun tidak dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Surakarta, 16 September 2019
Penulis,

Okta Ahmad Faisal.
E0015309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan mengenai Pers dan Kebebasan Pers.....	12
2. Tinjauan mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi	13
3. Tinjauan mengenai Dewan Pers	14
4. Tinjauan mengenai Politik Hukum.....	15

5. Tinjauan mengenai Teori Sistem Hukum	15
6. Tinjauan mengenai Nota Kesepahaman	17
7. Tinjauan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung	18
B. Kerangka Pemikiran	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Idealitas Penegakan Hukum Pers Ditinjau dari Undang-Undang	
Nomor 40 Tahun 1999	22
1. Pengaturan Menngeni Penegakan Hukum dalam Kasus Pemberitaan	
Pers pada UU Nomor 40 Tahun 1999	22
2. Peraturan Pendukung UU Pers Mengenai Mekanisme Penyelesaian	
Kasus Pidana Pemberitaan Pers	27
3. Kekuatan Hukum Peraturan Pendukung UU Pers	32
4. Kasus yang Menyangkut Pemberitaan Pers	37
5. Penegakan Hukum yang Ideal pada Kasus Pemberitaan Pers	48
B. Alasan Mengapa Penegakan Hukum Pers Memerlukan Politik Hukum	
yang Khusus	54
1. Alasan Filosofis	54
2. Alasan Historis Politis	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ide Kemerdekaan Menyatakan Pendapat dalam Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945.....	62
Tabel 2. Landasan Yuridis Kemerdekaan Pers Indonesia.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penilaian Atas Sengketa Media dengan Masyarakat	3
Gambar 2. Skematik Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 3. Skematik Penyelesaian Perkara Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigatif.....	50
Gambar 4. Skematik Penyelesaian Perkara Pemberitaan Pers Melalui Jalur Litigatif (Acara Pidana).....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Lampiran 2. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia

Lampiran 3. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Lampiran 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008

Lampiran 5. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Bir

